

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Hakim G. Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Abdul Muis Yusuf, M. Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdurachman, 1978, *Masalah Pencabutan Hak dan Pembebanan Atas Tanah di Indonesia, Seri Hukum Agraria I*, Alumni, Bandung.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Agus, HM., Santoso, 2013, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Alga, dkk., 1983, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.
- Amiruddin, dkk., 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andiko Hardiyanto, et. al., 2018, *Kerangka Hukum Hutan Adat*, Perkumpulan Huma Indonesia, Jakarta.
- Anne M. Larson, 2013, *Hak Tenurial Dan Akses Ke Hutan: Manual Penelitian Untuk Peneliti*. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Anto Soemarmanto, 2005, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Aris Munandar, 2019, *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat. Dari Substansi menuju Koherensi*, Uwais Inspirasi Indonesia, Makassar.
- Arba, H.M., 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Aritonang, Jan. S., dkk, 2006, *Beberapa Pemikiran Menuju Dalihan Natolu*, Dian Utama, Jakarta.
- Atik Catur Budiati, 2009, *Sosiologi Kontekstual*, Pusat Pembukuan Departemen Nasional, Jakarta.
- Aziz, M., 2008, *Pesan Lestari dari Negeri Ammatoa*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Bachriadi dan Lucas, 2001, *Merampas Tanah Rakyat. Kasus Tapos dan Cimacan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Bagir Manan et al, 1993, *Beberapa Masalah Hukum Tatanegara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- _____, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta.
- _____, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta.
- Bamba, 2006, *Status Hukum dan Politik Masyarakat Hukum Adat*, Institute Dayakology dan Green Library, Pontianak.
- Bambang Pamulardi, 1996, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Boedi Harsono, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

- _____, 2003, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cetakan kesembilan (edisi revisi), Djambatan, Jakarta.
- BPHN, 1976, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2019, *Teori hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Wydia, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bushar Muhammad, 1984, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1991, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cetakan ke-5, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Catharina Dewi Wulansari, 2016, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, PT Refika Aditama, Bandung.
- Cornelis van Vollenhoven, 1913, *Het adatrecht van Nederlandsch Indie*, Leiden.
- _____, 2013, *Orang Indonesia dan Tanahnya*, Sleman, STPN Press bekerja sama dengan Sajogyo Institute, Tanah Air Beta, dan Perkumpulan HuMa, Jakarta. Cornelis Van Vollenhoven, 1904, *Adatrecht*. Jilid 2.
- Daulay Zainul, 2011, *Pengetahuan Tradisional. Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, 1995, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djojodigoeno, 1960, *Harapan Hukum Adat Indonesia*, Badan Penerbit Gadjah Mada, Jogjakarta.
- Djuwend dan Sandra Moniaga, 1994, *Kebudayaan dan Manusia yang Majemuk; Apakah Masih Punya Tempat di Indonesia?* dalam ELSAM dan LBBT, Konvensi ILO 169 Mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka, Pontianak : ELSAM dan LBBT, Jakarta.
- Dt. Perpatih Nan Tuo, N., 1999, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Yayasan Salako Batuah, LKAAM, Sumatera Barat, Padang.
- El Muhtaj Madja, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, PT. Grafindo Persada.
- Eva Achjani Zulfa, 2010, *Keadilan Restorative*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Friedmann, W., 1994, *Teori dan Filsafat Hukum. Susunan II, (Legal Theory)*. Penerjemah Muhammad Arifin, cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gamin, et. al., 2014, *Konflik Tenurial dalam Pembangunan KPH: Pembelajaran dari Hasil Penilaian Cepat di KPHP Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu*, Working Group on Forest-Land Tenure, Bogor.
- Hadri Abunawar dan Samsul Arifin, 2019, *Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguasaan Hutan Adat di Lampung Barat*, Sai Wawai Publishing, Metro.
- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan (Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana)*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hanafi Arief, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta.

- Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State* (alih Bahasa Somarno), Rimdi Press, Jakarta.
- _____, 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung.
- Harahap, A Bazar, dkk, 2005, *Tanah Ulayat Dalam Sistem Pertanahan Nasional*, Sandipeda, Jakarta.
- Harahap, E.St., 1960, *Perihal Bangsa Batak*, Depatemen Pendidikan, Jakarta.
- Hari Chand, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Review, Kuala Lumpur.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dalam Beperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Herlambang P. Wiratraman et al., 2018, *Pandangan Hukum Hutan Adat Papua, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Indonesia*, Jakarta.
- Hesty Hastuti, 2000, *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.
- Hilman Hadikusuma, 1981, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Alumni, Bandung.
- _____, 1980, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- _____, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Cetakan kesatu, Alumni, Bandung.
- _____, 2003, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cetakan kedua, Mandar Maju, Bandung.
- I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia - Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Nyoman Nurjaya, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, UM Press, Malang.
- Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Skesta Azas*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1982, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberti, Yogyakarta.
- Iman Soetikno, 1983, *Proses Terjadinya UUPA*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 1990, *Politik Agraria Nasional*, Gajah Mada University press, cetakan ketiga, Yogyakarta.
- Indrayanto, 2010, *Ekologi Hutan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2016, *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Komnas HAM, Jakarta.
- James Anderson, 1975, *Public Police Making*. Second Edition, Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Jamie S Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga, 2010, *Adat dalam Politik Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, KITLV, Jakarta. Lihat juga "Masalah Papua" KOMPAS. Senin 31. Oktober 2011, Hlm. 2.
- J.C Vergouwen, 1986, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Pustaka Azet, Jakarta.

- Jawahir Thontowi, Dkk., 2012, *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Jeffries, 2006, *Biodiversity and Conservation*, Second Edition, Roudledge, Canada.
- Jimly Asshiddiqie dan Saifuddin, M. Ali, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta.
- _____, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Yarsif Yatampone, Jakarta.
- _____, 2008, *Menuju Negara Hukum Demokratis*, Mahkamah Konstitusi RI. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan, Jakarta.
- _____, 2009, *Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- John Henry Merryman, 1969, *The Civil Law Tradition*, Stanford University Press, California.
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, Oxford.
- _____, 2006, *A theory of Justice Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kartika, Sandra dan Chandra Gautama, 1999, *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*, KMAN, Jakarta.
- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1966, *Pengantar Antropologi*, Yayasan Penerbit Indonesia, Jakarta.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta.
- Kurnia Warman, 2010, *Hutan Adat di Persimpangan Jalan: Kedudukan Hutan Adat di Sumatera Barat Pada Era Desentralisasi*. Dalam *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*, HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV, Jakarta.
- _____, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk. Dinamika Interaksi Hukum adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV, Jakarta.
- Laksanto St., Utomo, 2019, *Hukum Adat*. Cetakan ketiga, Rajawali Pers, Depok.
- Laurens Bakker, 2010, *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia Bernegara Hukum dan berbagi Kuasa dalam Urusan Agraria di Indonesia: Sebuah Pengantar*, HuMa, Jakarta.
- Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Rahim Lubis, 2012, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Lubis, M.Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung
- Lyndayati, 2002, *Ide dan Lembaga dalam Kebijakan Perhutanan. Masyarakat, hutan dan Pembuatan Kebijakan di Indonesia*, Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor.

- Mahadi, 1991, *Uraian Singkat tentang Hukum Adat, Sejak RR tahun 1854*, Penerbit Alumni, Bandung.
- M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Mahfud MD, 2011, *Perkembangan Politik Hukum. Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta.
- Malik, 2019, *Laporan Akhir Analisis atas Produk Hukum Daerah Mengenai Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK 35*, Perkumpulan HuMa Indonesia, Jakarta.
- Maria Rita Ruwiasuti, 2000, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria. Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak-Hak Adat*, Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- _____, 2009, *Kebijakan Pertanahan. Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- _____, 2018, *Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat*, FHUGM, Yogyakarta.
- _____, 2020, *Agenda Yang Belum Selesai. Refleksi Atas Berbagai Kebijakan Pertanahan*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mariam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marjanne Termorshuizen-Ars, 2010, *Rakyat Indonesia dan Tanahnya: Perkembangan Doktrin Domein di Masa Kolonial dan Pengaruhnya dalam Hukum Agraria Indonesia. Dalam Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*, HuMa, Vanvollenhoven Institute, KITLV, Jakarta.
- Marsveen Ann dan Robert Seidman 2001, *Legislative Drafting for Democratic Social Change*, The Hague Boston Kleumer International, London.
- Michael Doherty, 2001, *Text Book Jurisprudence: the Philosophy of law Second Edition*, Old Bailey Press, London.
- Mochamad Indrawan, Richard B.Primack dan Jatna Supriatna, 2007, *Biologi Konservasi*, Buku Obor, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- _____, dkk., 2014, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung
- Muhammad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara. Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, Cetakan I, Yogyakarta.
- Muhammad Hatta, 2005, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum*, Media Abadi, Yogyakarta.
- Muhammad Koesnoe, 1979, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Mukti Fajar dan Yuliantao Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.

- Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono, 2010, *Bernegara Hukum dan berbagi Kuasa dalam Urusan Agraria di Indonesia. Sebuah Pengantar, Dalam Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*, HuMa, Vanvollenhoven Institute, KITLV, Jakarta.
- _____, 2010, *Reformasi Hukum Periferal: Kepastian Tenurial dan Hutan Kemasyarakatan di Lampung*, Dalam *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*, HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV, Jakarta.
- _____, et. al., 2011, *Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial: Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia tentang Prinsip, Prasyarat, dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Kawasan Hutan di Indonesia*, Epistema, HuMa, FKMM, WG-Tenure, KPA, KPSHK, AMAN, Pusaka, JKPP, SAINS, Karsa, KKI-WARSI, JAVLEC, SCALE UP, SAMDHANA, Jakarta.
- _____ dan Luluk Uliyah, 2014, *Adat di tangan Pemerintah Daerah Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Epistema Institute, Jakarta.
- Myron Weiner, 1967, *Modernisation, The Dynamic of Growth*, United State Information Service, Washington.
- Nasroen, 1971, *Dasar Falsafah Adat Miangkabau*, Cetakan Kedua, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.
- Navis, A. A., 1984, *Alam Berkembang Jadi Guru*, Penerbit Grafiti Press, Jakarta.
- Nora Hidayati, et.al, 2020, *Pelambatan Hutan Adat Pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo*, Jakarta.
- Notonagoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Bina Aksara, Jakarta.
- Noer Fauzi Rahman dan Mia Siscawati, 2014, *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum Dan Pemilik Wilayah Adatnya*, Insist Press, Yogyakarta.
- Otje Salman Soemadiningrat, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 2011, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Edisi kedua, Alumni, Bandung.
- Onvlee, 1973, *Cultur als Antwoord. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal, Land, en Volkenkunde (66)*, The Hague: Martinus Nijhoff.
- Parlindungan, A.P., 2008, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*. Cetakan kesembilan, Mandar Maju, Bandung.
- Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, 1993, *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu*, Grafitri, Bandung.
- Peluso, 2005, *“Seeing Property in Land Use; Local Territorialization in West Kalimantan Indonesia*, sebagaimana dikutip dalam *Berebut Hutan Siberut – Orang Mentawai, Kekuasaan dan Politik Ekologi*, Gramedia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*. Cetakan kesepuluh, Kencana, Jakarta.
- Peter J Burns, 1999, *The Leiden Legacy Concepts of Law in Indonesia*, Desertation, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1974, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, Harper Torch Book, New York, 1978, Rafael Edy Bosco (Penerjemah).

- Phillipus M.Hadjon, P. M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Putu Oka Ngakan et.al, 2009, *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan*, Pers, Jakarta.
- Rajagukguk, Erman, et.al, 2007, *Masalah Tanah di Indonesia dari Masa ke Masa*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Ratno Lukito, 2008, *Tradisi Hukum Indonesia*, Teras, Yogyakarta.
- Reny Rawasita, et.al., 2009, *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.
- Rianto Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Ridwan Halim, 2010, *Hukum Agraria dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roestandi R., Ardiwilaga, 1960, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit, N.V. Masa Baru, Bandung.
- Roscoe Pound, 1965, *Contemporary Jurisdic Teory*, dalam D.Llyod (ed), *Introductoin to Jurisfrudence*, Stecens, London.
- Roy, C.K., 1996, *Land Rights of the Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Tracts*, Bangladesh. Distr. oleh Jumma Peoples Network in Europe (JUPNET).
- Saafroedin Bahar, 2005, *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi manusia, Jakarta.
- Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Buku Satu. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- _____ dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sally Folk Moore, 1993, *Hukum dan Perubahan Sosial. Bidang Sosial Semi-Otonom Sebagai Suatu Topik Studi yang Tepat*. Dalam Ihromi, T.O (Penyunting) *Antropologi Hukum. Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Samosir, Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sandra Moniaga, 2010, *Antara Hukum Negara dan Realitas Sosial Politik di Tataran Kabupaten. Perjuangan Mempertahankan Hak Atas Tanah Adat di Perdesaan Banten. Dalam Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*, HuMa, Vanvollenhoven Institute, KITLV, Jakarta.
- _____ dan Stepanus Djuweng, 1994, *Konvensi ILO 169 mengenai bangsa pribumi dan masyarakat adat di negara-negara merdeka*, ELSAM dan LBBT, Jakarta.
- Sardjiti Th., 1990, *Ajaran Tentang Keputusan Dalam Disiplin Hukum (Suatu Telaah Terhadap Pandangan B. Ter Haar Bzn Dan L. Pospisil)*, Hukum dan Pembangunan, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- _____, 2005, "Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)". Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (ed.), *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

- _____, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- _____, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir*. Cetakan kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- _____, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- _____, 2010, *Sosiologi Hukum. Esai-Esai Terpilih*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanto, 2009, *Memahami Hukum. Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sembiring, Rosnidar, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Depok.
- _____, 2008, *Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Dalam Masyarakat Adat Simalungun*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sidharta, B. Arief, 2000, *Hukum dan Logika*, PT. Alumni, Bandung.
- Simarmata, Rikardo, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre in Bangkok.
- _____, 2007, *Pluralisme Hukum, Mengapa Perlu?*, Lihat dalam Donny Donardono (Ed), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, HuMa, Jakarta.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, 2015, *Arti dan Fungsi tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo dan Simalungun*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Siscawati dan Zakaria 2010, *Kajian Peningkatan Kapasitas Untuk Hutan Kemasyarakatan di Indonesia*, RECOFTC – The Center for People and Forest, Bogor and Bangkok.
- Sitanggang J. P., 2010, *Raja Napogos*, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Siti Hapsah Isfardiyana, 2018, *Hukum Adat*, UII Press, Yogyakarta.
- Soehino, 2000, *Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soejono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soepomo, 1966, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Universitas, Jakarta.
- Soepranto R., 1966, *Undang-undang Agraria dalam Praktek*, Mitra Sari, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1981, *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan ke-1, CV. Rajawali, Jakarta.
- _____, 1981, *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta.
- _____, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 2001, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan ke-12, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Soerojo Wignjodipoero, 2004, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Cetakan kesepuluh, Haji Masagung, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosebroto, 1995, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Pokok-pokok Pikiran tentang Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat*, dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (eds.), *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Soleman Biasane Taneko, 1981, *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Sonny A. Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Suardi, 2005, *Hukum Agraria*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta.
- Sudarsono, 1994, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-3, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1988, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sukirno, 2018, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sukmadinata, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Graha Aksara, Bandung.
- Sulistiowati Irianto, 2005, *Sejarah dan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya. Tulisan dalam Pluralisme Hukum. Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Penerbit HuMa, Jakarta.
- Suntana Asep Sugih, et al, 2000, *Agenda 21 Sektorial, Agenda Kehutanan Untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan*, Kantor Menteri KLH, Jakarta.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Suteki, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Memutus Perkara; Perspektif Sociologist Jurisprudence*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Syahmunir, 2005, *Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPMI) Sumatera Barat.
- Tan, K.L., 1972, *De Agrarische Basiswetvan 1960*, Publication Dokumentatiebureuea voor Overzees Recht (DOR), Leiden.
- Tarigan, Abetnego, dkk., 2018, *Strategi Percepatan Tora dan Perhutanan Sosial, Penguatan Pranata dan Prakarsa Lokal dalam Penyiapan Dokumentasi dan Perizinan*, Konsorsium KpSHK, Bogor.
- Ter Haar, 2011, *Azas-azas dan Tata Hukum Adat (Beginnelsen an Stelsel van het Adatrech)*, Cetakan kesatu. Mandar Maju, Bandung.
- Tholib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia. Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung.
- Tim Inkuiri Komisi Nasional Komnas HAM, 2016, *Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di kawasan Hutan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

- Trakansuphakon, Prasert, 2000, *“Adaptation and Cultural Heritage Through Traditional Agriculture: A Case Study of the Karen of Northern Thailand.”* In: Thomas, V. (ed.). *Traditional Occupations of Indigenous and Tribal Peoples: Emerging Trends*. Proyek untuk mendorong Kebijakan ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, Jenewa.
- Triana Rejekiningsih, 2011, *Hukum Agraria Bagi Warganegara*, Surakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Van Vollenhoven, 1932, *De Indonesier en Zijn Ground*, Leiden, Brill.
- Wahyu Nugroho, 2013, *Mendesain Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, dalam Esmi Warassih (Editor), *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*; Konsorsium Hukum Progresif, Thafa Media, Semarang.
- Warassih P, Esmi, 2005, *Lembaga Prana Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- World Bank Operational Manual : Operational Directive (OD. 420)*.
- Wuisman, M., 1996, *Penelitian Ilmu Sosial*, Jilid 1, Penyunting M. Hisman, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Yance Arizona, 2010, *Antara Teks Dan Konteks. Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Di Indonesia*, Huma, Jakarta.
- _____, 2014, *Konstitusionalisme Agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- _____, Siti Rakhma dan Erasmus Cahyadi, 2014, *Kembalikan Hutan Adat Kepada Masyarakat Hukum Adat. Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan*, Perkumpulan HuMa Indonesia Epistema Institute Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta.
- Yando R., Zakaria, dkk., 2018, *Perhutanan Sosial. Dari Slogan Menjadi Program. Naskah Akademik Reformulasi Kebijakan Perhutanan Sosial*, Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, Jakarta.
- Yudhi Setiawan, 2009, *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Yohanes Mardimin, 1996, *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Yuliantri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Zefrizal Nurdin, dkk., 2020, *Hak Ulayat Dalam Dinamika Masyarakat Matrilineal Minangkabau. Suatu Tinjauan Yuridis*, Andalas University Press, Padang.

DISERTASI/THESIS :

- Arif Rahman, 2012, *Kajian Politik Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Fak. Hukum UGM, Yogyakarta.
- Azmi Fendri, 2002, *Pemanfaatan Tanah Ulayat (Kajian Terhadap Perjanjian Antara Masyarakat Nagari Puar dengan Koperasi Agam Timur)*, Tesis pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

- Brosse, J. "The Sacred Tree". In: *UNESCO Courier*, No. XLII, Jan. Paris. 1989.
- Rappaport, J. *Territory and Tradition. The Ethnohistory of the Paez of Tierradentro*, Colombia. Disertasi Ph.D Urbana, Illinois. 1982, hlm. 316-329.
- UNDP. Highland Peoples Programme. Dokumen Latar Belakang RAS/93/103. Jenewa, 1997, p.16.
- Seithel, F. *Zur Geschichte der Action Anthropology am Beispiel Ausgewaehlter Projekte aus den USA und Kanada*. Mainz. 1986, hal. 232. Coyote 3/96, Muenchen.
- Edwin, 2012, *Eigendom sebagai Alat Bukti yang Kuat dalam Pembuktian Kepemilikan Tanah pada Hukum Tanah Indonesia*, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2012, *Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Kurnia Warman, 2009, *Pengaturan Sumberdaya Agraria Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat. Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Dalam Perspektif Keanekaragaman Dalam Kesatuan Hukum*. Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Latief A. Fariqun, 2007, *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional*, Disertasi, Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Maria Theresia Geme, 2012, *Perlindungan hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada*. Propinsi Nusa Tenggara Timur, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Marthin, 2015, *Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Pada Tanah Ulayat*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Robert K.R. Hammar, 2011, *Implikasi Penataan Ruang terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat*, Ringkasan Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sukirno, 2014, *Rekonstruksi Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Hak Ulayat (Studi Pengakuan Dan Perlindungan Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy dari Hegemoni Negara)*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Taqwaddin, 2010, *Penguasaan atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Mukim di Propinsi Aceh*, Disertasi, Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Zefrizal Nurdin, 2017, *Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal Sebagai Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang.

JURNAL :

- Arimbi Heroepoetri dan Dahniar Andriani, 2020, *Policy Brief RUU Masyarakat Adat: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia*, Edisi Kedua Februari.

- Dahlan, 2001, *Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, NO. 28 Edisi April.
- Disnawati, 2013, *Penerapan Prinsip Hidup Kamase Masea Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Bulu Kumba, Sulawesi Selatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jurnal Sabda, Volume 8.
- Erica-Irene Daes, 1995, *Evolution of Standards Concerning the Rights of Indigeous People: News Development adan Generals Discussion of Future Action*, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/AC.4/3.
- _____, 2001, *Indigenous peoples and their Relationship to Land: Final Working Paper Prepared by the Special Rapporteur Mrs Erica –Irene Daes, Commission on Human Right*.
- Fathor Rahman, 2018, *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia (Melacak Berlakunya Kembali Peradilan Adat di Indonesia Dan Relevansinya Bagi Upaya Pembangunan Hukum Nasional)*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 2, edisi Juli-Desember 2018.
- Fay dan de Foresta. 1998, Michon et al, 2000, *Kemajuan Dalam Meningkatkan Peran Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Lahan Hutan di Indonesia*. Kertas Kerja Riset Kebijakan Asia Tenggara No. 27. ICRAF-SE.
- Fokky Fuad, 2006, *Studi Kritis UURI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Peranan MHA*, Lex Jurnalica Vol.3 No. 2, April.
- Frichy Ndaumanu, 2018, *Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, Jurnal HAM, Volume 9, Nomor 1, Juli.
- Gunggung Senoaji, 2010, *Masyarakat Baduy, Hutan, Dan Lingkungan*, Jurnal Manusia Dan Lingkungan, Vol. 17, No.2, Juli.
- Hardijan Rusli, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3.
- Hendra, 2013, *Totua Ngata dan Konflik (Studi atas Totua Ngata sebagai Lembaga Adat di Kecamatan Marawola)*, Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 34 No. 1, Jakarta.
- Herman Dan Hendry Julian Noor, 2017, *Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking)*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 3, Nomor 1, Pebruari.
- Ikhana Indah Barnasaputri, 2021, *Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai*, Universitas Airlangga, Jurnal Notaire, Vol. 4 No. 1, Februari.
- IWGIA. Indigenous Affairs, No. 1, Jan-Feb-Maret 1998. Kopenhagen, hal. 56.
- Jawahir Thontowi, 2015, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*, Jurnal Pandecta, Volume 10. Nomor 1. Juni.
- Lalu Subardi, 2013, “*Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.2 April-Juni.
- M. Cobo, *A Study of the Problems of Discrimination against Indigenous Populations*, UN Doc.E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.8, ayat 379 and 381

sebagaimana dikutip oleh Peter Malanczuk, 1997, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, New York: Routledge.

- _____, Pelapor Khusus dari Sub-Komisi mengenai Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Minoritas: Study on the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations. Dokumen PBB No.E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.1, Pasal.196 dan 197.
- Magdalena, 2013, *Peranan Hukum Adat dalam Penhelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang, Kalimantan Timur*, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Volume 10 Nomor 2, Juni.
- Mani Ram Banjade, dkk., 2017, *Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia Kapan? Apa? Mengapa?* Jurnal Info Brief, No. 173, Juni.
- Maria Erbania Mayang Tarigas, 2015, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Hutan Adat di Desa Sahapam Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Myrna Safitri, 2015, *Menilai Kepastian Tenurial Hak Atas Tanah MHA dan Masyarakat Hutan Lainnya Dalam Kerangka Hukum Indonesia*, Laporan Akhir serahkan kepada CIFOR, Bogor.
- Nur Azizah Raja, 2019, *Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)*, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 12, Nomor 1, edisi Januari.
- Pan Mohamad Faiz, 2009, "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.
- Pianter Jaya Hairi, 2016, *Kontradiksi Pengaturan Hukum Yang Hidup di Masyarakat Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Negara Hukum, Volume 7 Nomor 1 Edisi Juni.
- Roewiastoeti, 2014, *Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*, Wacana: Jurnal Transformasi Sosial No. 33/XVI.
- Safrin Salam, 2016, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat*, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 7 No. 2 bulan Agustus.
- Sefa Martinesya, 2020, *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat*, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni.
- Subarudi, 2013, *Dampak Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengurusan dan Pengelolaan Hutan*, Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Jurnal policy brief, Volume 7 No. 2.
- Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani, 2018, *Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno dan Relevansinya Kini*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 30 Nomor 3 Edisi Oktober.
- Sulastriyono, 2014, *Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal Yudisial, Vol. 3 No. 3.
- Sulfan dan Mahmud, A., 2018, [Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari. Sebuah Kajian Filsafat Sosial](#), Jurnal Aqidah-Ta Vol. IV No. 2

- Tejokusumo, Bambang, 2014, [Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial](#), Jurnal Geoedukasi Volume III Nomor 1, Edisi Maret
- Teuku Muttaqin Mansur dan Faridah Jalil, 2013, *Aspek Hukum Peradilan Adat di Indonesia Periode 1602-2009*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 59, Th. XV Edisi April.
- Yance Arizona, 2014, *Dibutuhkan Pengakuan Hukum Terintegrasi: Kajian Hukum Penerapan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau*, Wacana Jurnal Transformasi Sosial, Nomor 33, Tahun XVI, 2014, Indonesian Society for Social Transformation (INSIST), Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KAMUS :

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Eko Hadi Wiyono, 2007, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Akar Media, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lorens Bagus, 1996, Kamus Filsafat, Gramedia, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Realty Publisher, Jakarta.
- Nokia, English-English Dictionary.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Edisi ketiga; Oxford, Oxford University Press.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Balai Pustaka, Jakarta.

LOKA KARYA/SIMPOSIUM/PROSIDING/PENELITIAN:

- Alan Boulton, 2003, *Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, 1989 (No.169): Sebuah Panduan, Proyek Untuk Mendorong Kebijakan Ilo Mengenai Masyarakat Hukum Adat*, Jenewa, Kantor Perburuhan Internasional, Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta, hlm. 11. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--asia/--ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141867.pdf
- Abdurrahman, 2015, *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Jakarta.
- Agung Wibowo dan Nadya Demadevina, 2020, *Opini Hukum: Peraturan Menteri No. p.17/Menlhk/Setjen/kum.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak*, Perkumpulan Huma Indonesia, Jakarta.
- Ahmad , Ubbe, dkk, 2013, *Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Penanggulangan Pembalakan Liar*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Aliansi Masyarakat Hukum Adat (AMAN), 2019, Dalam Diskusi Pararel “*Konstekstualisasi dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*” dalam acara *Festival Hak Asasi Manusia ke 6 Tahun 2019*, Jember 19-21 November 2019.
- Arifin Saleh, 2015, *Panduan Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pemanfaatan Mekanisme Pembayaran Layanan Ekosistem di Hutan Adat*, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Japan Social Development Fund, Jakarta.
- Attamimi, A.Hamid S., 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I – PELITA IV*, Fakultas Pascasarjana, Jakarta.
- Bachtiar Abna dan Dt. Rajo Sulaiman, 2007, *Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat. Masukan Dalam Lokakarya Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan*, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Padang.

- Barda Nawawi Ari Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Semarang, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Efri Subayang (Ketua Badan Pelaksana Harian AMAN Wilayah Riau), 2014, pada acara Focus Group Discussion (FGD) tentang “Pelaksanaan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012” di Kantor AMAN Riau, 11 September 2014.
- Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hasil Penelitian, *Peranan Ninik Mamak Dalam Pembangunan, 1977-1978*.
- Goldief J. William Kawer, 2006, *Studi Tenurial Komunitas Masyarakat Hukum Adat Nambluong Kampung Berap*, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Laporan Penelitian, CIFOR, Bogor.
- Katharine Krall, 2000, *where Do We Stand? An Examination of Indigeneous People Rights Within Internasional Law*, Den Haag, Paper.
- Kurnia Warman, Busman Karel dan Heri Sugianto, 2002, “Penggalian Potensi Hukum Adat dalam Rangka Penanganan Kasus Pencurian Hasil Hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat: Studi kasus pencurian kayu di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat”, Hasil Penelitian, Small Research Grants 2000- 2001 TNKS, Yayasan Kehati, Jakarta.
- _____, dkk., 2019, *Laporan Penelitian Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penguatan Hak MHA Atas Tanah dan Sumber Daya Alam*, Kerja Sama MK dan Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat (PAgA) F.Hukum Unand, Padang.
- Kerjasama KOMNAS HAM, 2007, FH. Universitas Andalas Padang dan Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat. *Membangun Masa Depan Minangkabau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Mia Siscawati, Sajogyo, 2013, *Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 35, MRV dan Pemanfaatan CLAS Lite untuk Analisis Deforestasi Bali*, Institute Pelatihan Awal REDD, Bali.
- Muhammad Arman, 2016, *Legislasi Daerah Masyarakat Adat Pasca Putusan MK. 35/PUU-X/2012*, Makalah pada pertemuan Simposium Masyarakat Adat II Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaharuan Hukum, Peringatan 2 tahun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, Universitas Pancasila.
- Muhammad Zaid (Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan), 2014, bahan Focus Group Discussion (FGD) mengenai “Pelaksanaan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012”, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, di Ruang Rapat Kapus P3DI, Jakarta, 13 Agustus 2014.
- Myrna A. Safitri, 2014, *Dalam Lokakarya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012* yang diselenggarakan oleh Forest Watch Indonesia pada 11 Agustus 2014.
- _____, Hasbi Berliani, dan Suwito, 2015, *Penetapan Hutan Adat. Interpretasi Hukum dan Diskresi*, Partnership Policy Paper, No. 7/2015, Kemitraan, Jakarta.
- Nababan, Abdon, 2002, Dalam Makalah *Revitalisasi Hukum Adat Untuk Menghentikan Penebangan Hutan Secara “Illegal” di Indonesia*.
- Prosiding, 2017, *Seminar Nasional dan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI*, Jakarta, 12 April 2017.

- Saafroedin Bahar, Makalah disampaikan dalam Workshop Hasil Penelitian di Tiga Wilayah. *Mendorong Pengakuan, Penghormatan & Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia*, Lombok, 21 - 23 Oktober 2008.
- Sinclair Dinnen, 2003, *Interfaces Between Formal and Informal Justice Sistem To Strengthen Access to Justice By Disadvantaged Sistem*, Makalah disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pasific Rights and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2006, Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia), Makalah pada Seminar Nasional “*Pluralisme Hukum : Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikiran di Indonesia dan Pergulatannya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum*”, pada 21 November 2006 di Universitas Al-Azhar, Jakarta.
- Thontowi, Jawahir, 2008, *Penelitian Antropologi Budaya Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pusat Pengembangan Perbatasan di Kecamatan Saajingan Besar, Kabupaten Sambas. Kalimantan Barat*, diselenggarakan berkat kerjasama CLDS FH UII dengan Bappeda Kabupaten Sambas.
- Wisnubroto, Al., 2014, *Dasar-dasar Hukum Progresif (Makalah Materi Sekolah Hukum Progresif Angkatan I, Kerjasama Laboratorium Hukum FH UAJY dengan Paguyuban Sinau Hukum Progresif), KMMH (Keluarga Mahasiswa Magister Hukum) UGM dan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) UMY, Yogyakarta*.
- Yance Arizona, 2013 *Peluang hukum implementasi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 ke dalam konteks kebijakan pengakuan masyarakat adat di Kalimantan Tengah*. Makalah disampaikan dalam Lokakarya “Fakta Tekstual Quo Vadis Hutan Adat Pasca Putusan MK Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Palangkaraya, Rabu 20 November 2013, Acara diselenggarakan oleh AMAN Kalteng dan WWF Program Kalimantan Tengah.
- _____, 2015, “*Trend Produk Hukum Daerah Mengenai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat*”. Bahan presentasi yang disampaikan pada “Sarasehan dalam rangka Rapatkerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sorong, Papua Barat, 16 Maret 2015
- Yando R. Zakaria, 2014, *Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya Terhadap Perebutan Sumberdaya Hutan Pasca Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur*, Jurnal Wacana XVI (33).
- _____, 2015, “*Too Much Law Will Kill You! Dinamika Pembaruan Hukum Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat Pasca-Reformasi*”. Makalah yang dipersiapkan untuk Konferensi ke 5 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Surakarta, 14 – 15 November 2015.
- Yuliyah Hasan, 2008, *Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Tanah Ulayat Baduy pada Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus: Masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar, Desa Kenekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten)*, Penelitian. Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Pertanian IPB.

SURAT KABAR DAN WEBSITE:

- AMAN, Profil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, diakses dari <http://www.aman.or.id/profil-alianasi-masyarakat-adat-nusantara/>
- Hamka, 2006, Islam dan Adat Minangkabau, Selangor Darul Ehsan, Pustaka Dini, hlm. 115, <https://www.sumbartoday.net/2018/07/22/tanah-ulayat-di-minangkabau-di-jua-indak-di-makan-bali-digadai-indak-dimakan-sando/>
- Indigenous people and Sustainable Development, (Discussion Papers)* http://www.ifad.org/gb_does/gc/26/e/ip.pdf.
- <https://tanobatak.wordpress.com/2007/06/20/kearifan-budaya-batak-mengelola-lingkungan/> Diterbitkan oleh tanobatak 20 Juni 2007.
- <http://staging-point.com/read/2018/09/07/Urgensi.Perda.Pengakuan.Hutan.Adat>
- <https://inibaru.id/tradisinesia/mengenal-suku-samin-dan-ajaran-ajaran-yang-dianutnya>.
- <https://kbbi.web.id/> 2017, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan).
- <https://kbbi.web.id/adat>.
- <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200707-123850-2343.pdf>
- <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/394>
- <https://kbbi.web.id/sinergi>.
- <https://perempuan.aman.or.id/wp-content/uploads/2020/07/bambang-supriyanto-kearifan-lokal-dan-hutan-adat-9-juli-2020.Pdf>.
- <https://www.alagraph.com/berita/detail/konflik-lahan-pt-lonsum-dan-masyarakat-adat-kajang-terus-berlanjut>.
- https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr.
- <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/01/22/ruu-masyarakat-adat-perlu-segera-disahkan/>
- <https://www.mongabay.co.id/2019/05/29/kementerian-lingkungan-rilis-peta-indikatif-hutan-adat-dan-ubah-aturan/>.
- <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/12/30/presiden-jokowi-berikan-sk-pengakuanhutan-adat-kepada-semilan-komunitas-masyarakat>
- Indah Sri Pinasti dan Terry Irenewaty, "Kajian Historisitas Masyarakat Samin di Blora dalam Perspektif Pendidikan Karakter," Prosiding Seminar Nasional, V LPPM UNY, Meneguhkan Peran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Memuliakan Martabat Manusia. Dimuat dalam http://eprints.uny.ac.id/40285/1/Prosiding%20Seminar%20Nasional%20LPPM%20UNY%202016%20rev_4.pdf .
- Jamie S Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga, 2010, Adat dalam Politik Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, KITLV, Jakarta, hlm: ix. Lihat juga "Masalah Papua" KOMPAS. Senin 31 Oktober 2011.
- Jaringan Tata Kelola Kehutanan, Masyarakat Adat: Mencari Format Hukum Hak atas Sumber Daya Alam, (Online), (<http://tatakelolahutan.net/masyarakat-adat-mencari-format-hukum-hak-atas-sumber-daya-alam/>, diakses tanggal 20 April 2018).
- Kabar Hutan. Masa Depan Perhutanan Sosial di Indonesia. Senin, 29 April 2019. <https://forestsnews.cifor.org/60560/masa-depan-perhutanan-sosial-di-indonesia>.

- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Online)
<https://id.wiktionary.org/wiki/pengakuan>, www.artikata.com.
- Kerusakan Hutan Belum Berhenti, Kompas, 20 Juli 2020, hlm. 8
- Laksanto Utomo, Pers Release, Pernyataan Sikap Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Jakarta, 1 April 2019,
<https://www.gatra.com/detail/news/501173/politik/apha-minta-dpr-serius-selesaikan-ruu-masyarakat-hukum-adat>.
- Maria S.W. Sumardjono, Harmonisasi Kedudukan Hak Ulayat Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,
<http://tanobatak.wordpress.com/2010/03/28/harmonisasi-kedudukan-hak-ulayatdalam-peraturan-perundangan-di-indonesia/>
_____, Hak Ulayat dan Pengakuannya oleh UUPA” Kompas 13 Mei 1993.
_____, Hak Masyarakat Hukum Adat, Opini surat kabar harian Kompas, 19 Juni 2013.
- Martua Sirait, Chip Fay dan A.Kusworo, 1999, Bagaimana Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?, Naskah Akademis Untuk Departemen Perhutanan dan Perkebunan, www.worldagroforestrycenter.org/sea/Publications..
- Myrna Safitri. Mencari Perusak Hutan. Koran Kompas. Tertanggal 10 Maret 2015.
- Nasution Adnan Buyung, 2010, Pikiran dan Gagasan; Demokrasi Konsitusional, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Nia Ramdhaniaty, Koordinator Tim Peneliti dalam Workshop Belajar dari Proses Pra dan Paska Hutan Adat di Indonesia: Menju Percepatan Hutan Adat yang Berkualitas, di Century Park Hotel, Jakarta, Jumat (30/11/2018).
<http://rmibogor.id/2019/01/28/penetapan-hutan-adat-butuh-pembenahan-lebih-lanjut/>
- Outlook HuMa Indonesia 2021, <https://web.huma.or.id/pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/advokasi-publik/outlook-huma-2021.html>.
- Ruang Informasi Publik Perhutanan Sosial
<http://pkps.menlhk.go.id/index/index#piaps>
- Rukka Sombolinggi, 17 Maret 2021, Pidato Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dalam Perayaan HKMAN 2021 & 22 Tahun AMAN dengan tema “Tetap Tangguh di Tengah Krisis”.
<https://www.aman.or.id/2021/03/pidato-sekretaris-jendral-aliansi-masyarakat-adat-nusantara-dalam-perayaan-hkman-2021-22-tahun-aman/>
- Sastroprawiro, Susetiyaningsih, 2008. *Peringkat Hutan Kelas Dunia*, Kompas 10 Desember 2008, Edisi Bandung.
- Suaraagraria.com. “AMAN : Pasca Putusan MK 35/2012, negara tidak boleh lagi mengusir 40 juta MHA di Areal Hutan Adat. <http://suaraagraria.com/detail>.
- Seno Tri Sulistiyo, Malvyandie Haryadi (ed), 2021, *Dukungan Publik Tentukan Nasib RUU MHA*, Tribun News.Com Jakarta, tanggal 17 Maret 2021.
<https://www.tribunnews.com/nasional>.
- The United Nations General Assembly Resolution 2006/02 dalam <http://www.ohcrh.org/english/issue/indigenous/docs/declaration.doc>.
- Usman Sumardjani, “Masyarakat Adat”, <http://www.konflik.rimbawan.com/pdf-16sept05/300masyFINALE.pdf>, diakses tanggal 27 Januari 2018. Lihat juga Husein Altung, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan*

Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang), LaksBang PressIndo, Yogyakarta.

Wahyu Candra, “Masyarakat Adat Jayapura Akui Sembilan Komunitas”, Kompas, 27 Oktober 2014. <https://www.mongabay.co.id/2014/11/08/kala-9-komunitas-adat-di-jayapura-peroleh-pengakuan/>

Widyasmoro, 2006, Kajang, Badui dari Sulawesi, Majalah Intisari Edisi: No. 511
Yance, Arizona, 2017, Mengintip Hak Ulayat Dalam Konstitusi di Indonesia, <https://yancearizona.files.wordpress.com/2008/07/mengintip-hak-ulayat-dalam-konstitusi-di-Indonesia.pdf>. 13 Maret 2017, pukul 20.00 WIB.



